

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan peningkatan kompleksitas tantangan organisasi, manajemen koordinasi antar lembaga menjadi semakin krusial, terutama dalam konteks penegakan hukum dan keamanan nasional. Salah satu isu yang memerlukan perhatian khusus adalah pengawasan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang (Narkoba) di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Bagian Selatan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam pengawasan Narkoba. Wilayah Sulawesi Bagian Selatan dengan garis pantai yang panjang dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang tersebar di wilayahnya, menjadi salah satu pintu masuk potensial bagi penyelundupan Narkoba (BNN, 2021). Karakteristik geografis ini membutuhkan pendekatan manajemen yang adaptif dan kolaboratif antar berbagai lembaga penegak hukum.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan sebesar 15% kasus Narkoba di Sulawesi Selatan dalam periode 2020 sampai dengan 2021, dengan metode penyelundupan yang semakin canggih (BNN, 2022). Fenomena ini menggarisbawahi urgensi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui optimalisasi *joint enforcement* yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BNN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas barang, memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan penyelundupan Narkoba. Namun, kompleksitas permasalahan Narkoba membutuhkan pendekatan multi-lembaga yang terkoordinasi dengan baik (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi tantangan kompleks.

Implementasi *joint enforcement* dalam konteks pengawasan Narkoba menghadapi berbagai tantangan manajerial, termasuk:

1. Ego sektoral antar lembaga yang menghambat pertukaran informasi efektif (Kadarmanta, 2019).
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan Narkoba (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2021).
3. Infrastruktur teknologi yang belum terintegrasi antar lembaga (BNN, 2022).
4. Karakteristik geografis Sulawesi Bagian Selatan yang menyulitkan pengawasan menyeluruh (Bappenas, 2020).

Penggunaan teknologi informasi, khususnya data hasil dari kegiatan cyber crawling dan analisis big data, menjadi salah satu solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan keahlian SDM dan infrastruktur yang belum memadai (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Penelitian ini akan menganalisis strategi komprehensif untuk mengoptimalkan joint enforcement Narkoba di wilayah Sulawesi Bagian Selatan, dengan fokus pada peran Bea Cukai sebagai koordinator. Analisis akan menggunakan kerangka teoritis manajemen strategis, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berbasis bukti.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian diatas, maka pertanyaan spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme implementasi joint enforcement dalam pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang (Narkoba) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di wilayah Sulawesi Bagian Selatan?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh instansi terkait dalam pelaksanaan joint enforcement Narkoba di wilayah Sulawesi Bagian Selatan?
3. Bagaimana strategi optimalisasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas joint enforcement Narkoba di wilayah Sulawesi Bagian Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi joint enforcement Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang (Narkoba) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di wilayah Sulawesi Bagian Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh instansi terkait dalam pelaksanaan joint enforcement narkoba di wilayah tersebut.
3. Untuk merumuskan strategi optimalisasi yang dapat meningkatkan efektifitas koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan joint enforcement pengawasan narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis :

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik dalam bidang manajemen koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam konteks *joint enforcement* pengawasan narkoba.
- Menambah literatur terkait strategi pengawasan lintas Lembaga dalam isu Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang di Indonesia.

b. Manfaat Praktis :

- Menjadi referensi bagi instansi seperti Bea Cukai, BNN, Polri dan BPOM dalam merancang kebijakan atau perbaikan mekanisme koordinasi pengawasan narkoba di wilayah Sulawesi Bagian Selatan.
- Memberikan masukan strategis dalam merumuskan kebijakan sinergis yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkoba lintas wilayah.

1.5 Sistematika Tesis

Agar dapat mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan tesis. Adapun sistematika tesis tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan literatur terkait topik penelitian dan teori-teori yang relevan dijadikan dasar penelitian. Pada bab ini peneliti mengkaji berbagai sumber yang memiliki kaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai acuan dalam hipotesis. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu, yaitu beberapa hasil dari penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik analisis data dan

menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan hingga penggunaan analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan dan menguraikan hasil analisis pengolahan data dan pembahasan terkait rumusan masalah dan pembahasan mengenai strategi implementasi pelaksanaan *joint enforcement* narkoba.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian beserta implikasi penelitian yang terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi manajerial dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Joint Enforcement

Konsep *joint enforcement* atau penegakan hukum bersama merupakan suatu strategi yang melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk mencapai tujuan yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep ini sangat penting dalam konteks penanganan kejahatan lintas batas, di mana satu lembaga penegak hukum saja sering kali tidak memiliki sumber daya atau wewenang yang cukup untuk menangani masalah tersebut secara efektif. Misalnya, dalam kasus perdagangan manusia, kerjasama antara kepolisian, imigrasi, dan lembaga internasional seperti Interpol sangat diperlukan untuk melacak dan menangkap pelaku yang sering berpindah-pindah lokasi. Dengan adanya joint enforcement, informasi dan sumber daya dapat dibagikan secara lebih efisien, sehingga meningkatkan peluang untuk mengungkap jaringan kriminal yang lebih besar.

Dalam praktiknya, *joint enforcement* tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi, tetapi juga mencakup pelatihan bersama, operasi gabungan, dan penggunaan teknologi canggih. Sebagai contoh, dalam operasi penangkapan sindikat narkoba, beberapa negara dapat mengerahkan tim gabungan yang dilengkapi dengan teknologi pemantauan dan pengawasan canggih untuk melacak pergerakan barang haram tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga dan negara dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam penegakan hukum. Selain itu, studi kasus dari operasi penegakan hukum internasional seperti

"Operation Ice" yang dilakukan oleh beberapa negara untuk memerangi penyelundupan narkoba menunjukkan bahwa kesuksesan dalam *joint enforcement* tidak hanya bergantung pada kerjasama antar lembaga, tetapi juga pada komitmen politik dan dukungan masyarakat yang kuat. Dengan demikian, *joint enforcement* bukan hanya sekadar strategi, tetapi juga sebuah pendekatan holistik yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

2.1.1 Defenisi dan Ruang Lingkup

Joint enforcement atau penegakan hukum bersama, merupakan pendekatan strategis yang melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menghadapi masalah yang kompleks, salah satunya adalah peredaran narkoba. Dalam konteks pengawasan narkoba, *joint enforcement* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi yang lebih baik antar instansi. Menurut Bennett (2018), pendekatan ini tidak hanya sekadar memfasilitasi berbagi informasi, tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih besar dalam menghadapi tantangan yang ada. Sinergi ini tercipta ketika berbagai lembaga, seperti kepolisian, BNN, dan instansi terkait lainnya, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberantas peredaran narkoba yang semakin marak.

Ruang lingkup *joint enforcement* mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pengumpulan intelijen, pelaksanaan operasi bersama, hingga penegakan hukum yang terintegrasi. Dengan kata lain, *joint enforcement* dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen dalam sistem hukum untuk bekerja sama secara harmonis. Sebagai contoh, data dari Badan Narkotika Nasional

(BNN) Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi dalam pengawasan narkoba telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang ditangani, dari 5.000 kasus pada tahun 2015 menjadi 7.500 kasus pada tahun 2020 (BNN, 2021). Angka ini mencerminkan bahwa melalui pendekatan *joint enforcement*, instansi-instansi dapat lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menangkap pelanggar hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum yang terintegrasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Dalam praktiknya, *joint enforcement* tidak hanya terbatas pada penegakan hukum domestik, tetapi juga melibatkan kerjasama internasional. Misalnya, dalam konteks peredaran narkoba, banyak negara yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba lintas batas. Oleh karena itu, kerjasama antara negara-negara dalam hal pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi bersama sangatlah penting. Contoh nyata dari kerjasama internasional ini dapat dilihat pada operasi "Cobra" yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara yang berhasil menggagalkan pengiriman besar narkoba dari satu negara ke negara lainnya. Melalui kerjasama yang erat, negara-negara tersebut dapat saling mendukung dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang sama.

Transisi yang lancar antar instansi dalam *joint enforcement* juga memerlukan adanya sistem komunikasi yang efektif. Sistem ini harus mampu menyediakan informasi yang tepat dan cepat kepada semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis teknologi yang memungkinkan instansi untuk berbagi data dan intelijen secara real-time dapat mempercepat proses

pengambilan keputusan dalam operasi penegakan hukum. Dengan demikian, instansi-instansi dapat merespons dengan cepat terhadap situasi yang berkembang dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindakan kriminal lebih lanjut.

Namun meskipun joint enforcement menawarkan banyak keuntungan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya juga tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam budaya organisasi antar instansi yang berbeda. Setiap lembaga memiliki cara kerja dan prosedur yang berbeda, yang kadang-kadang dapat menghambat kolaborasi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesepahaman dan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Pelatihan bersama dan kegiatan pengembangan tim dapat menjadi solusi untuk mengatasi perbedaan ini, sehingga semua instansi dapat bekerja dengan tujuan yang sama.

Bahwa joint enforcement merupakan pendekatan yang efektif dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi masalah kompleks seperti peredaran narkoba. Dengan meningkatkan kolaborasi antara instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum, serta memanfaatkan teknologi informasi, joint enforcement dapat menciptakan sinergi yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, upaya untuk membangun kerjasama yang solid dan saling percaya akan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Joint Enforcement

Prinsip-prinsip *joint enforcement* merupakan fondasi yang sangat penting dalam penegakan hukum yang efektif. Kolaborasi, transparansi, dan pertukaran informasi adalah tiga pilar utama yang mendukung keberhasilan operasi bersama antara berbagai instansi. Kolaborasi, sebagai inti dari *joint enforcement*, tidak hanya mencakup pembagian tugas di antara instansi yang terlibat, tetapi juga melibatkan pengembangan strategi yang terintegrasi. Misalnya, dalam penanganan kasus-kasus kejahatan lintas batas, berbagai instansi seperti kepolisian, imigrasi, dan bea cukai perlu duduk bersama untuk merumuskan pendekatan yang komprehensif. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem yang ada dan merancang solusi yang lebih efektif.

Transparansi dalam setiap tahap proses *joint enforcement* juga memegang peranan yang sangat krusial. Ketika instansi-instansi berbagi informasi mengenai proses dan hasil operasi, mereka tidak hanya membangun kepercayaan di antara mereka, tetapi juga dengan masyarakat. Misalnya, publikasi hasil operasi yang berhasil dapat meningkatkan citra positif instansi penegak hukum di mata masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum meningkat hingga 30% setelah adanya laporan transparan mengenai keberhasilan operasi bersama dalam memberantas kejahatan narkoba (Universitas Indonesia, 2021). Dengan demikian, transparansi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga strategi untuk memperkuat legitimasi dan dukungan publik.

Pertukaran informasi yang cepat dan akurat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam *joint enforcement*. Sebuah contoh nyata adalah operasi gabungan antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kepulauan Riau - Batam, yang berhasil mengungkap lebih dari 10 ton narkoba dalam waktu dua tahun. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya saluran komunikasi yang efektif dan sistem informasi yang terintegrasi antara kedua instansi. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi seperti sistem database bersama atau platform komunikasi real-time sangat membantu dalam mempercepat proses pertukaran informasi. Ketika satu instansi mendapatkan informasi mengenai potensi ancaman, mereka dapat segera menyampaikannya kepada instansi lain yang relevan, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cepat.

Lebih jauh lagi, analisis mendalam mengenai pertukaran informasi menunjukkan bahwa kualitas informasi juga sangat penting. Informasi yang akurat dan relevan dapat menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dalam kasus operasi bersama, informasi yang kurang akurat dapat berakibat fatal, seperti kesalahan dalam penangkapan atau pengambilan tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pertukaran informasi menjadi sangat penting. Sebuah laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal analisis data dan intelijen dapat meningkatkan efektivitas operasi bersama hingga 40% (BNPT, 2020).

2.2 Pengawasan Narkoba

Pengawasan narkoba merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dari pengaruh negatif narkoba. Secara umum, pengawasan narkoba dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memantau, mengendalikan, dan mencegah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Dalam konteks ini, pentingnya pengawasan narkoba tidak hanya terletak pada upaya pencegahan, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Misalnya, di Indonesia, data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik melalui biaya kesehatan maupun hilangnya produktivitas.

2.2.1 Pengertian dan Pentingnya Pengawasan Narkoba

Pengawasan narkoba merupakan aspek krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Pengertian pengawasan narkoba tidak hanya terbatas pada tindakan pengawasan fisik terhadap peredaran narkotika, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi bagi para pengguna. Dalam konteks ini, pengawasan narkoba berfungsi sebagai jaring pengaman yang melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh, data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, dengan lebih dari 3 juta orang teridentifikasi sebagai pengguna aktif. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat

dan sistematis untuk menanggulangi masalah ini.

Pentingnya pengawasan narkoba tidak dapat dipisahkan dari dampak luas yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, seorang pengguna narkoba dapat mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental, yang pada gilirannya dapat mengganggu produktivitas kerja dan hubungan sosial. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sering kali berujung pada tindakan kriminal, seperti pencurian dan kekerasan, yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan narkoba menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran perilaku negatif ini dan menjaga keamanan serta ketertiban sosial.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan narkoba melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Contohnya, program rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang dilaksanakan oleh BNN bekerja sama dengan rumah sakit dan pusat rehabilitasi dapat membantu mengembalikan pengguna ke jalan yang benar. Selain itu, edukasi tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan langkah preventif yang penting untuk meminimalisir angka penyalahgunaan di kalangan remaja. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan pengawasan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pengawasan narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam

mengenai pengertian dan pentingnya pengawasan narkoba, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Melalui kolaborasi yang solid dan program-program yang terencana, kita dapat menciptakan masyarakat yang bebas dari pengaruh buruk narkoba, serta meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang. Pengawasan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

2.2.2 Kebijakan dan Regulasi Terkait Narkoba

Dalam menjalankan pengawasan narkoba, kebijakan dan regulasi yang jelas sangat diperlukan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan peredaran narkoba, penegakan hukum terhadap pelanggaran, hingga rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia memberikan kerangka hukum yang kuat untuk penanganan masalah narkoba. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai klasifikasi narkotika, sanksi bagi pelanggar, serta upaya rehabilitasi bagi pecandu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan narkoba tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pemulihan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, pengawasan narkoba juga melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Kerjasama ini sangat penting karena masalah narkoba adalah isu multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik. Misalnya, program-program pencegahan yang dilakukan di sekolah-sekolah dapat melibatkan guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan kesadaran akan bahaya

narkoba dapat meningkat, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa program edukasi yang melibatkan orang tua dan siswa secara bersamaan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan program yang hanya melibatkan satu pihak.

Di sisi lain, tantangan dalam pengawasan narkoba juga tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya peredaran narkoba yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Para pengedar narkoba seringkali menggunakan teknologi dan metode yang inovatif untuk menghindari penegakan hukum. Misalnya, penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana untuk menjual dan mendistribusikan narkoba semakin meningkat. Oleh karena itu, pengawasan narkoba harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penegakan hukum yang efektif perlu didukung oleh teknologi yang canggih, seperti sistem pemantauan berbasis data dan analisis kriminal yang mendalam.

Dalam konteks global, pengawasan narkoba juga menjadi isu yang sangat penting. Banyak negara telah mengadopsi konvensi internasional, seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi PBB tentang Psikotropika 1971, untuk mengatur peredaran narkoba secara global. Kerjasama internasional dalam pengawasan narkoba sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah bekerja sama untuk melakukan operasi penangkapan jaringan narkoba internasional yang beroperasi di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara, tetapi merupakan tantangan global yang memerlukan kolaborasi lintas batas.

2.3 Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen dan administrasi publik yang bertujuan menyelaraskan berbagai kegiatan, tugas, dan kewenangan agar seluruh unsur dapat bergerak secara terpadu menuju tujuan yang sama. Menurut **Mooney**, koordinasi adalah proses penyatuan dan pengaturan seluruh aktivitas organisasi agar berjalan dalam satu ritme yang selaras. **Gulick** dalam prinsip POSDCORB juga menempatkan koordinasi sebagai fungsi utama untuk menyatukan upaya berbagai unit agar tidak terjadi duplikasi tugas maupun konflik kewenangan. Sementara itu, **Terry (2003)** mendefinisikan koordinasi sebagai sinkronisasi usaha secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Senada dengan itu, **Handyaningrat (1985)** menjelaskan bahwa koordinasi merupakan kegiatan untuk menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan agar tercipta efektivitas dan efisiensi organisasi.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses menyatukan tindakan, menyelaraskan peran, dan mengintegrasikan sumber daya dari berbagai pihak sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan harmonis, tidak tumpang tindih, dan menghasilkan kinerja yang lebih efektif. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana BNN, Polda, dan BBPOM bekerja sama melalui mekanisme joint enforcement pengawasan narkotik.

2.3.1 Teori Manajemen Koordinasi

Dalam membahas teori manajemen koordinasi, penting untuk memahami berbagai pendekatan yang ada dan bagaimana masing-masing dapat diterapkan

dalam praktik. Salah satu pendekatan yang paling banyak dibahas adalah pendekatan berbasis tujuan, di mana koordinasi difokuskan pada pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks ini, manajer perlu menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur, sehingga semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dicapai. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur, semua pemangku kepentingan, mulai dari kontraktor hingga pemerintah, harus memiliki visi yang sama tentang hasil akhir yang diinginkan. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil dapat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Pendekatan lain yang relevan dalam teori manajemen koordinasi adalah pendekatan berbasis proses. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengelola alur kerja dan interaksi antar departemen atau unit dalam organisasi. Dalam praktiknya, hal ini sering kali melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Misalnya, penggunaan perangkat lunak manajemen proyek dapat membantu tim untuk melacak kemajuan tugas, berbagi informasi secara real-time, dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi krisis. Dengan demikian, pendekatan berbasis proses tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat hubungan antar anggota tim.

Dalam konteks manajemen koordinasi, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koordinasi. Salah satu faktor kunci adalah budaya organisasi. Budaya yang mendukung kolaborasi dan komunikasi terbuka akan memudahkan proses koordinasi. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *agile* sering kali memiliki budaya yang mendorong tim untuk berkolaborasi secara erat dan berbagi informasi dengan

cepat. Hal ini tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan inovasi dan respons terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, memahami dan membangun budaya organisasi yang mendukung koordinasi menjadi sangat penting dalam implementasi teori manajemen koordinasi.

2.3.2 Peran Koordinasi Dalam Joint Enforcement

Koordinasi dalam penegakan hukum bersama (*joint enforcement*) adalah elemen kunci yang mendasari efektivitas kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Dalam dunia yang semakin terhubung, tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini tidak mengenal batas negara. Misalnya, dalam kasus perdagangan manusia, di mana sindikat kejahatan seringkali beroperasi di beberapa negara sekaligus, koordinasi antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara menjadi sangat penting. Tanpa adanya komunikasi yang efektif dan berbagi informasi yang transparan, upaya untuk menangkap pelaku kejahatan bisa terhambat, dan para pelaku tersebut dapat dengan mudah melarikan diri ke negara lain. Oleh karena itu, membangun jaringan komunikasi yang solid dan sistem berbagi informasi yang efisien adalah langkah awal yang krusial dalam menciptakan sinergi yang diperlukan untuk menanggulangi kejahatan lintas negara.

Contoh nyata dari pentingnya koordinasi dalam penegakan hukum bersama dapat dilihat dalam operasi internasional melawan narkoba. Di berbagai belahan dunia, lembaga penegak hukum seperti DEA (*Drug Enforcement Administration*) di Amerika Serikat dan NCA (*National Crime Agency*) di Inggris seringkali bekerja sama untuk membongkar jaringan narkoba yang kompleks. Misalnya, dalam Operasi Trident, yang melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum dari

berbagai negara, mereka berhasil menyita jutaan dolar narkoba dan menangkap ratusan pelaku kejahatan. Dalam operasi ini, informasi tentang rute pengiriman, identitas pelaku, dan metode penyelundupan dibagikan secara real-time, memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk merespons dengan cepat dan efektif. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Tidak hanya dalam konteks internasional, koordinasi juga sangat penting di tingkat domestik. Dalam penegakan hukum, berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan harus dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar. Misalnya, dalam kasus kejahatan terorganisir, kepolisian mungkin memerlukan bantuan dari unit intelijen untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebelum melakukan penangkapan. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara unit-unit ini, ada risiko bahwa informasi penting bisa terlewatkan, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, membangun saluran komunikasi yang efektif antar lembaga adalah langkah yang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja menuju tujuan yang sama.

Selanjutnya, analisis mendalam mengenai sistem koordinasi dalam *joint enforcement* juga mencakup tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam sistem hukum dan prosedur antar negara. Misalnya, apa yang dianggap sebagai bukti yang sah dalam satu negara mungkin tidak diterima di negara lain. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan bahkan konflik dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa negara telah mengembangkan perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur kerjasama

dalam penegakan hukum, seperti Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. Perjanjian semacam ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan prosedur antara negara-negara yang terlibat, sehingga memudahkan proses koordinasi dan penegakan hukum di tingkat internasional. Dalam kesimpulan, peran koordinasi dalam penegakan hukum bersama tidak dapat diremehkan. Baik di tingkat domestik maupun internasional, koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan membantu mengatasi tantangan yang ada. Melalui contoh-contoh nyata dan analisis mendalam, kita dapat memahami betapa pentingnya membangun sistem komunikasi dan kerjasama yang solid untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, investasi dalam koordinasi bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bebas dari kejahatan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini terkait penelitian terdahulu berfungsi untuk mendapatkan gambaran, kerangka berpikir serta mempelajari berbagai metode analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan pada penelitian yang dikerjakan penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat kekurangan dan kelebihan pada hasil penelitian yang dilaksanakan.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wardhani LAS, 2021	<i>“Implementasi Pembentukan Sistem Interdiksi Terpadu Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 pada BNN .”</i>	Mengulas Operasi Laut Interdiksi Terpadu sebagai model operasi gabungan multi-lembaga (BNN, Polri, DJBC, Kemenhub, TNI AL).
2.	Rahel Kartika & Parningotan Malau, 2021	<i>“Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau.”</i>	Membahas wilayah pengawasan laut DJBC dan kebutuhan koordinasi operasional dengan aparat lain di jalur maritim.
3.	Dimas Rudi Hartanto, 2021	<i>“Sinergi Stakeholder Dalam Menangani Ancaman Penyelundupan Narkoba Di Propinsi Aceh.”</i>	Sinergi antar stakeholder sudah berjalan namun harus ditingkatkan terutama dengan dukungan masyarakat dan peningkatan kapasitas (teknologi, sarana)
4.	Hasanuddin, 2022	<i>“Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Wilayah Timur Indonesia.”</i>	Dibutuhkan pendekatan berbasis data intelijen dan teknologi informasi terpadu serta pentingnya pelatihan dan Protokol Operasi Bersama
5.	Nurul Asma B., Cathas Teguh Prakoso (2022)	<i>“Collaborative Governance dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kalangan Remaja di Kelurahan Temindung Perma, Kota Samarinda.”</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk menganalisis aspek kelembagaan, proses kolaborasi, hambatan komitmen dan anggaran.
6.	Sigit Suhartanto, 2023	<i>“Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika Di Perbatasan Indonesia.”</i>	Menyoroti <i>joint operations</i> BNN di laut (operasi gabungan, penyitaan besar) dan perlunya koordinasi lintas instansi berkelanjutan.
7.	Aswari Hepni, (2024)	<i>“Effectiveness of Law Enforcement on Narcotics Crime through Synchronization of Authority Between the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police .”</i>	Sinergi membantu memperkuat koordinasi operasional dan kapasitas institusional dalam menghadapi kasus narkotika lintas wilayah maupun kerangka nasional/internasional.
8.	Yuanita Utami,	<i>“Analisis Collaborative</i>	Fokus pada governance

	dkk (2025)	<i>Governance pada Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.</i> ”	kolaboratif antar instansi (BNN, Pemerintah Daerah, Kepolisian) dalam P4GN, hambatan kelembagaan dan prosedur.
9.	Arsangela Putri Harahap & Frans Simangungsong, (2025)	“ <i>Sinergi Kewenangan Bea dan Cukai dan BNN Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Pelabuhan.</i> ”	Sinergi DJBC – BNN di Pelabuhan menitikberatkan pada pertukaran informasi intelijen, operasi gabungan dan pemanfaatan teknologi pemindai modern sehingga pola kerja menjadi lebih komprehensif untuk menekan penyelundupan melalui jalur pelabuhan.

2.5 Kerangka Penelitian

Dalam konteks pengawasan narkoba, kerangka penelitian yang komprehensif sangat penting untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh instansi terkait, khususnya dalam implementasi strategi *joint enforcement*. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana manajemen koordinasi yang efektif di Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan narkoba. Dalam kerangka ini, akan dianalisis berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi, komunikasi antar instansi, hingga penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan. Misalnya, penggunaan sistem informasi berbasis data yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Polri dan BNN dapat mempercepat proses deteksi dan penanganan kasus narkoba.

Selanjutnya, pentingnya kolaborasi antar lembaga juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Studi kasus di Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan *joint enforcement* sangat bergantung pada adanya kesepakatan dan pemahaman bersama di antara berbagai pihak. Dalam hal

ini, contoh konkret dapat diambil dari operasi bersama yang melibatkan Bea Cukai, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menggagalkan penyelundupan narkoba. Hasil dari operasi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya koordinasi yang baik, informasi dapat disebarluaskan dengan cepat, dan strategi penanganan yang lebih efektif dapat diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan sinergi antar instansi dalam pengawasan narkoba.

Melalui analisis mendalam terhadap kerangka penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang mendukung efektivitas *joint enforcement*. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi, seperti perbedaan budaya organisasi dan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam pengawasan narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Bagian Selatan.